

INOVASI PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

Lilian Sinta Ria Siagian¹, Auradian Marta²

^{1,2} Universitas Riau

Email: ¹lilian.sinta2347@student.unri.ac ; ²auradian_unri@yahoo.com

ABSTRAK. Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menekan laju pandemi covid-19 dengan memasang target untuk mencapai kekebalan tubuh sebesar 70 persen pada akhir tahun 2021 dengan melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 pada masyarakat terutama lansia, dengan itu pemerintah Kota Pekanbaru dituntut melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui inovasi pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inovasi percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan inovasi percepatan vaksinasi salah satunya melalui program menjemput bola dengan menyediakan bus vaksinasi keliling untuk menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sembari mensosialisasikan vaksinasi Covid-19. Pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin covid-19.

Kata kunci: Inovasi; inovasi pemerintah; vaksinasi covid-19.

GOVERNMENT INNOVATION IN ACCELERATING THE COVID-19 VACCINATION POLICY IN PEKANBARU CITY IN 2021

ABSTRACT. The spread of Covid-19 which was declared by WHO as a pandemic has been declared a national disaster. Therefore the government is making efforts to reduce the pace of the Covid-19 pandemic by setting a target to achieve 70 percent immunity by the end of 2021 by injecting the Covid-19 vaccine in the community, especially the elderly, with that the Pekanbaru City government is required to accelerate the Covid-19 vaccination. 19 in Pekanbaru City. The purpose of writing this research is to find out the innovations of the Pekanbaru City government in accelerating the Covid-19 vaccination policy and to describe the factors that influence the innovation of accelerating the Covid-19 vaccination policy in Pekanbaru City in 2021. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach which in collecting data, the authors use interviews and documentation techniques. The results of this study indicate that the Government of Pekanbaru City is innovating to accelerate vaccination, one of which is through the ball pick-up program by providing mobile vaccination buses to target people who have not received vaccinations while socializing the Covid-19 vaccination. Knowledge influences people's perception of the covid-19 vaccine, therefore it is necessary to provide comprehensive and equitable information to all people about the use, safety of the covid-19 vaccine and all updated information about the covid-19 vaccine.

Keywords: Innovation; government innovation; covid-19 vaccination.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah mem-bawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, Mahardhani menyatakan penyebaran Corona virus Disease 2019 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia terjadi di sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan tingginya angka Covid di Indonesia terutama di Kota Pekanbaru maka diterapkannya program vaksinasi. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk melakukan segala upaya untuk menekan laju pandemi covid-19 melalui penetapan kebijakan dan aturan seperti pelaksanaan protokol kesehatan

Setiap organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor publik berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi. Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan.

Menurut Yogi (2008) secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat didefinisikan sebagai penerapan ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung lama sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan organisasi.

Setiap pelaksanaan program-program Pemerintah terdapat beberapa instrumen hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termasuk untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Saat ini jumlah penduduk Kota pekanbaru berjumlah 1,136 juta jiwa. Untuk usia wajib vaksin berjumlah 730ribu jiwa, yang sudah divaksin sebanyak 143.960 jiwa hingga Jumat tanggal 28 mei 2021. Pemerintah Kota Pekanbaru menggesa percepatan vaksinasi COVID-19. Berikut cakupan data target serta sasaran vaksinasi Covid-19 12 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 tahun 2021 di Kota Pekanbaru:

Tabel.1 Cakupan data target serta sasaran vaksinasi Covid-19 31 Desember 2021 di Kota Pekanbaru

No	Kelompok	Target	Vaksinasi		Persentasi (%)	
			D1	D2	D1	D2
1	SDM Kesehatan		16.210	15.533	146,66%	140,53%
2	Lansia		32.420	26.195	61,46%	49,65%
3	Petugas Publik		156.510	139.833	260,83%	233,04%
4	Masyarakat rentan & Umum	70%	401.405	288.867	75,87%	54,60%
5	Remaja		91.622	72.565	96,31%	76,24%
6	Anak-Anak		1.712	167	1,66%	0,16%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 31 Desember 2021

Pekanbaru memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Provinsi Riau, yang berjumlah 47.266 kasus dengan korban tewas 1.064 orang. Kondisi ini adalah berbahaya, sehingga perlu penanganan yang cepat oleh Pemerintah. Berikut jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Riau:

Tabel.2 Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Posi-tif	Nega-tif	Jmlh meninggal
1	Pekanbaru	47266	42926	1064
2	Kampar	7729	6583	313
3	Pelalawan	3121	2630	162
4	Inhu	5698	4985	159
5	Inhil	4732	3872	148
6	Dumai	9646	8752	206
7	Kep. Meranti	1781	1569	55
8	Bengkalis	7913	6791	288
9	Siak	8596	7262	247
10	Kuansing	518	4552	138
11	Rohil	4759	3985	179
12	Rohul	4924	4094	268

Sumber: <https://corona.riau.go.id/>

Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan kebijakan vaksin COVID-19. Dengan peta jalan vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota pekanbaru akan menerapkan kebijakan mengikuti pedoman ini (Maryani, 2020). Komunitas lansia juga prioritas utama pada periode kedua vaksinasi di Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat

pada Dinas Kesehatan Pekanbaru bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mendata dan mendaftarkan lansia untuk vaksinasi (Pekanbaru.go.id, 2021). Dengan demikian, bisa jadi terlihat seberapa efektif kebijakan pemerintah kota Pekanbaru telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat khususnya pada masyarakat lanjut usia

Kota Pekanbaru.

Upaya pemerintah menggalakan vaksinasi COVID-19 guna mendapatkan kekebalan tubuh, Pemerintah mendorong masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan vaksinasi dengan memberlakukan ketentuan untuk melampirkan bukti Vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat pengurusan adminduk, yang mana semata-mata untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin untuk mengantisipasi me-luasnya kasus COVID-19 .

Selain itu, diadakannya vaksin massal di kota Pekanbaru tentunya mengalami beberapa problema, yang mana di masa pandemi ini masyarakat dianjurkan tidak melakukan ke-rumunan. Antusias masyarakat atas vaksinasi di Kota Pekanbaru sendiri sangat tinggi namun vaksin yang ada terbatas. Tidak sedikit masyarakat yang rela mengantri hingga 8 jam lamanya namun tidak mendapatkan vaksin.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas maka identifikasi masalah terkait Inovasi Pemerintah dalam Percepatan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemerintah mengharuskan segala urusan administrasi wajib adanya sertifikat vaksin dosis ke-2, dengan itu masyarakat antusias melakukan

vaksinasi akan tetapi vaksin Covid-19 di Kota Pekanbaru terbatas.

2. Vaksinasi di Kota Pekanbaru membuat antusiasme masyarakat untuk mengikuti program Vaksinasi Covid-19 terus meningkat. Namun, dampaknya terjadi kerumunan di lokasi vaksin massal yang dikhawatirkan dapat memicu penularan.
3. Target vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah 7ribu jiwa atau 70% dari target vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah 7ribu jiwa atau 70% dari total penduduk 1,2 juta jiwa, namun yang sudah terealisasi divaksin masih 452.875 jiwa hingga Jumat tanggal 17 September 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Inovasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru? dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana inovasi pemerintah Kota Pekanbaru dan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pemerintah dalam mempercepat kebijakan Vaksinasi Covid-19 di kota Pekanbaru.

Inovasi Pemerintahan (Sherwood Ancok, 2012). Memproduksi gagasan Mengevaluasi gagasan Mengimplementasi gagasan. Faktor yang mempengaruhi oleh sangkala (2013) Pendukung: Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan, Kerjasama dengan pihak di luar wilayah kerja, Visi dan Misi, Kelancaran komunikasi, Potensi swadaya, Penerapan prinsip keadilan, Kebutuhan masyarakat dan social budaya. Kendala: Inovasi program sebagai hal baru, Partisipasi

masyarakat belum maksimal, Kolaborasi belum efektif, Pemberdayaan warga belum maksimal, Keterbatasan Potensi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014:4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, diantaranya: mengajukan pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menafsirkan data. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat mempermudah peneliti dalam mencari informasi yang berdasarkan kenyataan di lapangan dan fenomena yang diinginkan oleh peneliti yaitu bagaimana Inovasi Pemerintah dalam Percepatan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sukardi, 2005,157). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan teknik untuk peneliti dapat informasi fakta yang diteliti secara tepat terkait Inovasi Pemerintah dalam Percepatan Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan Vaksinasi Covid-19 yang memiliki target akhir tahun 2021 setidaknya 70% masyarakat Kota Pekanbaru di vaksin, sehingga Pemerintah

Kota Pekanbaru dituntut melakukan inovasi agar tercapainya percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan berlangsung dengan empati, akrab, kedudukan peneliti sama, bahkan menjadi guru atau konsultan, berjangka waktu lama (Prastowo, 2012,46). Peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait permasalahan yang hendak diteliti dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam penelitian ini sebagian besar peneliti menggunakan teknik wawancara berhadapan-hadapan (face to face) dengan subyek penelitian, dimana peneliti mengunjungi informan dan melakukan wawancara secara pribadi. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, kamera serta rekaman saat melakukan wawancara. Selanjutnya, dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumen berupa bahan – bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah dan berita yang disiarkan kepada media massa (Creswell, 2014)

Pemaparan permasalahan dalam penelitian ini akan dijabarkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisa data penelitian kualitatif didefenisikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, jurnal lapangan dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 diatur bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi profesi kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang

dipandang perlu. Beberapa kebijakan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai bentuk inovasi dalam aktivitas nya. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2021 pada Bab 5A pelaksanaan Vaksinasi Pada pasal 17A.

Penulis terlebih dahulu menganalisis inovasi pemerintahan menggunakan tahapan inovasi pemerintahan menurut Ancok (2012:48) untuk mengetahui inovasi pemerintah kota Pekanbaru dalam percepatan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Tahapan Inovasi Pemerintah

a. Memproduksi gagasan

Dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah memiliki kewajiban untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 sehingga pemerintah telah menemukan vaksin dan melakukan percepatan kebijakan vaksinasi covid-19 yang mana vaksinasi gelombang pertama untuk tenaga medis, tokoh publik untuk memotivasi warga agar mengikuti program vaksinasi covid-19. Setelah itu target pemerintah untuk vaksinasi covid-19 yaitu masyarakat yang berumur 18tahun hingga 60tahun, dan diikuti lansia yang ditargetkan mulai bulan mei 2021.

Pemerintah kota pekanbaru melalui satgas penanganan Covid-19 membentuk tim untuk mempercepat vaksinasi yang mana bersinergi untuk melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Pemerintah melakukan kombinasi dengan banyak orang ataupun instansi pemerintah seperti pejabat daerah, TNI, POLRI serta dinas-dinas yang terlibat

didalam mencari mencari gagasan baru dengan semangat saling membantu.

Pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 dengan memperkuat screening dan tracking yang mana penguatan screening, testing dan tracing ini diperlukan untuk mengidentifikasi penyebaran kasus Covid-19 secara lebih cepat. Dengan itu, pemerintah menggen-carkan program vaksinasi sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memperkuat kekebalan komunitas dan meminimalkan risiko bagi mereka yang terpapar, dapat diuraikan gagasan-gagasan inovasi dalam percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

1. Memberlakukan menyertakan kartu vaksin sebagai persyaratan pengurusan administrasi penduduk serta tempat-tempat umum seperti penginapan, bank, kantor pelayanan publik, dsb.
2. Membuat Posko Central Vaksin di pusat perbelanjaan.
3. Membagikan fakta tentang vaksinasi dan mencari tahu siapa saja orang disekitar yang belum divaksin dan termasuk dalam kelompok prioritas.
4. Melakukan pendekatan berbasis komunitas yang mana menjadikan tempat-tempat ibadah tempat vaksinasi bagi warga sekitar untuk mendapatkan vaksin.
5. Membuat tanda ditempat pedagang, bahwa pedagang telah divaksin.
6. Vaksinasi Sistem mobile atau jemput bola dengan bus vaksinasi keliling menysar pemukiman warga ataupun masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk mau divaksinasi terutamanya yang belum melaksanakan vaksinasi.
7. Membuat iklan di tempat-tempat umum bahaya dari Covid-19

8. Optimalkan pemberian vaksin dengan membagi seusai wilayah kecamatan
9. Membuat fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat hingga vaksinasi secara 24jam di beberapa Rumah sakit.
10. Skema gotong royong antara pemerintah dengan pihak swasta.

b. Mengevaluasi gagasan

Vaksinasi massal telah digelar di sejumlah tempat sejak beberapa waktu lalu yang menyasar sejumlah kelompok penerima vaksin yang menjadi prioritas. Akan tetapi penyebaran tidak merata dikarenakan vaksinasi massal hanya terpusat di beberapa titik saja maka mengakibatkan kurangnya efektifitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan kerumunan. Menurut Sherwood Ancok, 2012:50 ada kriteria di dalam menyeleksi sebuah gagasan apakah dilanjutkan atau tidak, yakni: menanyakan berapa besar keuntungannya bagi organisasi bila gagasan tersebut dilaksanakan, apa saja sumber bdaya yang dibutuhkan, dan seberapa radikalkah gagasan.

Berkenan dengan keefektifitasan vaksinasi massal pemerintah me-ngerahkan bus vaksinasi keliling yang mana bertujuan memudahkan calon penerima vaksin untuk mendapatkan vaksin serta membantu kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang cukup sulit untuk bepergian jauh. selain menyediakan vaksinator pemerintah juga berupaya men-gerahkan beberapa unit bus untuk percepatan vaksinasi Covid-19 guna menyasar warga yang kesulitan mengakses tempat vaksinasi Covid-19. Pemahaman akan kebutuhan, keinginan, dan preferensi pengguna, dan orientasi pasar yang kuat, dengan input input berperan penting dalam membentuk konsep dan desain produk.

Dari gagasan-gagasan yang telah dikumpulkan, hasil wawancara dengan bapak Syafrian Tommy, S.TP, M.Si selaku kepala bidang tata pemerintahan Kota Pekanbaru, gagasan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru setelah dievaluasi sebagai berikut:

1. Memberlakukan kebijakan wajib adanya bukti melakukan vaksinasi untuk peryaratan akses pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan, pengurusan SIM ataupun pelayanan-pelayanan publik serta memasuki tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, penginapan dan sebagainya.
2. Membuat fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat hingga vaksinasi secara 24jam dibeberapa Rumah sakit.
3. Sistem pendaftaran online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar di samping itu juga untuk menghindari antrian serta kerumunan.
4. Vaksinasi Sistem mobile atau jemput bola dengan bus vaksinasi keliling optimalisasi pemberian vaksin dengan membagi sesuai wilayah kecamatan.

Tabel 3. Capaian vaksinasi Bus Keliling di Kota Pekanbaru pada 7 Juni 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Payung Sekaki	1.051
2	Tenayan Raya	1.016
3	Tuah Madani	695
4	Rumbai	538
5	Rumbai Timur	485
6	Binawidya	407
7	Kulim	381
8	Sukajadi	378
9	Pekanbaru Kota	342
10	Senapelan	330
11	Bukit Raya	276
12	Sail	227
13	Limapuluh	181
14	Marpoyan Damai	32

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Dari tabel di atas terdapat 14 kecamatan di kota Pekanbaru yang telah melaksanakan bus vaksinasi keliling yaitu kecamatan Payung Sekaki mencapai 1.051 warga, Payung Sekaki 1.051, Tenayan Raya sebanyak 1.016 warga yang tervaksin, Tuah Madani, sebanyak 695 warga, Rumbai sejumlah 538 warga, Rumbai Timur terdapat 485 warga, Binawidya sebanyak 407 warga, Kulim 381 warga, Sukajadi 378,

Pekanbaru Kota terdapat 342 warga, Senapelan 330 warga, Bukit Raya 276 warga, Sail 227 warga, Limapuluh 181 warga dan Marpoyan Damai sebanyak 32 warga.

5. Membuat posko central vaksin di pusat perbelanjaan

Tabel 4. Titik Bus Vaksinasi Keliling di Kota Pekanbaru pada 28 Juni 2021

No	Kecamatan	Titik Vaksin
1	Payung Sekaki	Jalan Serayu, Kantor Lurah Labuh Baru Timur
2	Tenayan Raya	Jalan Budi Luhur, Kantor Camat Tenayan Raya
3	Marpoyan Damai	Jalan Meranti
4	Rumbai Timur	Jalan Damai, Kantor Lurah Palas
5	Senapelan	Pasar Bawah, Depan Nasi Kapau Uni Ros
6	Sail	Jalan Cemara, Halaman Kantor BPTD Kemenhub
7	Payung Sekaki	Jalan Harapan Raya, Kantor Lurah Bandar Raya
8	Tuah Madani	Jalan HR Soebrantas, Halaman Graha Pena
9	Sukajadi	Jalan Bunga Harum, Posko PPKM
10	Lima Puluh	Pasar Lima Puluh

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Dari tabel di atas terdapat 10 kecamatan yang menjadi titik bus vaksinasi keliling pada 28 Juni 2022 diantaranya Kecamatan Payung Sekaki tepatnya di Jalan Serayu, Kantor Lurah Labuh Baru Timur; sedangkan kecamatan Tenayan Raya di Jalan Budi Luhur, Kantor Camat Tenayan Raya; kecamatan Marpoyan Damai di Jalan Meranti; kecamatan Rumbai Timur di Jalan Damai Kantor Lurah Palas; kecamatan Senapelan berada di Pasar Bawah, Depan Nasi Kapau Uni Ros; kecamatan Sail di Jalan Cemara, Halaman Kantor BPTD Kemenhub; kecamatan Payung Sekaki di Jalan Harapan Raya, Kantor Lurah Bandar Raya; kecamatan Tuah Madani di Jalan HR Soebrantas, Halaman Graha Pena; kecamatan Sukajadi tepatnya di Jalan Bunga Harum, Posko PPKM; sedangkan kecamatan Lima Puluh di Pasar Lima Puluh.

6. Melakukan pendekatan berbasis komunitas yang mana menjadikan tempat-tempat ibadah tempat vaksinasi bagi warga sekitar untuk mendapatkan vaksin.

c. Mengimplementasi gagasan

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan gagasan inovasi percepatan kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru dengan menyediakan bus vaksinasi keliling untuk menjangkau masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat daerah setempat seperti, babinkamtibmas, babinsa, camat, lurah, rw, rt serta tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah menggencarkan vaksin di tempat tertentu seperti di gedung guru, gedung olahraga, rumah sakit daerah dan puskesmas. Di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia khusus untuk guru, kampus-kampus. Kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dapat dilihat dengan Pemerintah kota pekanbaru dengan itu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019.

Implementasi berawal dari sebuah mekanisme suatu sistem, hal ini karena implementasi bukan sekedar suatu aktivitas tetapi juga meru-pakan suatu kegiatan yang tersusun dalam usaha mencapai tujuan bersama suatu organisasi.

Faktor pendukung implementasi dikategorikan seperti berikut:

1. Peran dari manager senior yang mendukung gagasan.

Seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs, inovasi membedakan antara seorang pemimpin dan seorang pengikut. Sebagai manajer inovasi, tugas dia adalah memelihara budaya kerja yang berani dan disruptif karena tidak sesuai dengan norma budaya dan sosia. Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru memberikan sanksi yang berupa teguran nakes yang dengan sengaja dan tanpa alasan menolak pemberian vaksin Covid-19 berupa teguran, jika teguran juga tidak diindahkan oleh nakes tersebut, izin praktek nakes ditinjau ulang oleh pemerintah.

2. Adanya sistem kompensasi yang mendukung untuk menghargai sebuah inovasi.

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka yang seimbang dengan pengharapan karyawan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa puas atas prestasi yang telah dicapai dan selaras dengan tujuan strategis usaha perusahaan. Dengan adanya tunjangan yang layak dan adil, akan terjadinya sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja.

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, tenaga kesehatan tentu sangat berisiko terpapar Covid-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari pemerintah bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian

bagi nakes yang meninggal akibat terpapar Covid-19 dalam masa tugas pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

3. Adanya pelatihan untuk mengimplementasikan sebuah gagasan inovatif.

Mengenai manfaat pelatihan pegawai telah banyak yang mengakuinya. Manfaat itu baik berkenaan langsung dengan individu maupun dengan organisasi dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pelatihan didefinisikan sebagai rencana sistematis untuk memodifikasi atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, melalui pengalaman belajar, yang pada gilirannya dapat mencapai kinerja secara efektif.

Sebelum melaksanakan vaksinasi covid-19 di Kota Pekanbaru tim vaksinator terlebih dahulu melakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain pelatihan, vaksinator juga sebagai pendukung juga disiapkan sarana rantai dingin chain, kulkas dan cold box agar mempermudah pendistribusian.

4. Adanya dukungan anggaran untuk merealisasikan sebuah gagasan sehingga akan menjadi sebuah produk yang siap dipasarkan.

Anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru tidak memiliki kendala dalam sumberdaya anggaran, karena program pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dibebankan melalui APBD (terutama untuk Pelaksanaan Vaksinasi).

Dengan kebutuhan anggaran yang relatif besar Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan memfokuskan kembali dan realokasi APBD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun rencana secara sistematis dalam jangka waktu tertentu dalam menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 yang mana dana APBD tahun 2021 di geser sebesar 8% yang digunakan untuk seluruh kegiatan vaksinasi dan tenaga vaksinator sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Faktor yang mempengaruhi inovasi

1. Faktor pendukung

- b. Ketegasan pemimpin dalam mengambil keputusan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru dr.Zaini Rizaldy, ketegasan pemimpin yang dimiliki walikota Pekanbaru bapak Dr. H. Firdaus, S.T., M.T dapat dilihat adanya surat edaran terkait ASN di lingkungan Pemko harus suntik vaksin, mereka bakal dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Satu sanksi, yakni pemotongan tunjangan kinerja. Bagi PPPK dan THL juga wajib mengikuti, kalau melanggar sanksinya pemutusan kontrak kerja. Begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi maka tidak mendapatkan pelayanan publik ataupun memasuki tempat-tempat umum.

- c. Kerja sama dengan berbagai pihak

Kerjasama antara kepala daerah dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan

obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

- d. Kelancaran komunikasi

Komunikasi transmisi menjadi penyalur komunikasi yang baik dan berdampak pada implementasi yang baik. Dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengambil langkah strategi dalam melakukan komunikasi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Strategi komunikasi yang digunakan adalah (1) Advokasi pemerintah daerah agar bisa mengerakan seluruh komponen yang ada secara birokratik bukan hanya jajaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru namun, berbagai pihak untuk mensosialisasikan vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini, berisi apa itu vaksin, kehalalan, manfaat, uji vaksin, dosis, jenis vaksin, kipi, dan tindakan yang akan diambil; (2) Bina suasana merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu untuk mau melakukan apa yang disosialisasikan terkait vaksinasi Covid-19; (3) Pemberdayaan, semua diberdayakan hingga pada tingkat yang paling bawah yaitu tingkat RT.

- e. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya yang dimaksudkan yakni meliputi ketersediaan personil atau tenagakerja di bidang kesehatan yang bisa mensupport proses pelaksanaan kebijakan. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memastikan pemberian vaksin COVID-19 dengan aman dan efisien.

f. Penerapan prinsip keadilan

Masyarakat lanjut usia atau lansia merupakan kelompok rentan terhadap virus corona. Dalam upaya melakukan melakukan percepatan vaksinasi kelompok lanjut usia atau lansia, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menerapkan door to door di beberapa kecamatan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak dapat menjangkau titik lokasi vaksinasi massal.

Tabel 5. Jumlah lansia yang melakukan vaksinasi sebelum dan setelah dilaksanakannya vaksin door to door.

No	Sebelum		Setelah	
	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 1	Dosis 2
1	10.596	6.853	32.420	26.195

Sumber: Dinkes Kota Pekanbaru, 2022.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah juga menerapkan kebijakan vaksin Covid-19. Komunitas lansia merupakan prioritas utama pada periode kedua vaksinasi di Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada Dinas Kesehatan Pekanbaru bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mendata dan mendaftarkan lansia untuk vaksinasi (Pekanbaru.go.id, 2021). Dengan demikian, bisa jadi terlihat seberapa efektif kebijakan pemerintah kota Pekanbaru telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat khususnya pada masyarakat lanjut usia Kota Pekanbaru.

Berikut Rasio perbandingan cakupan jumlah dari tingkat kota hingga provinsi sebagaimana berikut ini:

- Tingkat Kota Pekanbaru

$$\frac{\text{Jumlah sasaran target} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk kota Pekanbaru}}$$

$$748.096 \times 100\% = 70\%$$

$$\frac{748.096}{1.074.989}$$

- Tingkat Provinsi Riau

$$\frac{\text{Jumlah sasaran target} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk provinsi Riau}}$$

$$\frac{3.350.000}{6.450.000} \times 100\% = 52\%$$

Tabel 6. Rasio Cakupan.

No	Tingkat Cakupan	Rasio
1	Kota Pekanbaru	70%
2	Provinsi Riau	52%

Sumber: Dinkes Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas dapat peneliti menilai bahwa cakupan program vaksinasi massal Kota Pekanbaru hingga provinsi dapat dikatakan sudah mencapai minimal target yang diberikan oleh kementrian sesuai dengan hasil wawancara Ibu Delfi diatas, jadi Kota Pekanbaru sudah melaksanakan vaksin mencapai 70% dari penduduk Kota Pekanbaru namun belum merata karena belum secara keseluruhan penduduk Kota Pekanbaru telah di suntik vaksin.

2. Faktor penghambat

a. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal

Prasangka terhadap hal hal baru/asing dapat menghambat suksesnya inovasi karena Masyarakat tidak ingin tahu atau tertutup dan masyarakat mempunyai tuduhan buruk akan perubahan tersebut. selain masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19 kendala dalam melakukan vaksinasi lainnya seperti gangguan kesehatan, npenyakit bawaan, kondisi tubuh yang tidak menguntungkan, dll, yang menyebabkan fisik kesulitan bagi orang-orang tertentu untuk menerima vaksinasi karena akan berisiko secara fisik jika mereka terpaksa menerima vaksinasi.

b. Pemberdayaan warga yang belum maksimal

Berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. beredar hoaks kalau pemerintah menarik semua vaksin Covid-19 dari RS karena tak manjur. Faktanya, penarikan itu memang dilakukan bukan karena tidak ampuh, melainkan ada evaluasi pelaksanaan vaksinasi untuk mencocokkan data vaksin di rumah sakit dengan jumlah persediaan vaksin. banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa vaksinasi itu tidak penting terutama bagi lansia. Vaksinasi Covid-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh dan terpadu.

c. Kolaborasi Belum Efektif

Kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai pe-nyelenggara, karena beberapa di-antaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang me-rupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya

ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru melakukan inovasi percepatan vaksinasi Covid-19 melalui program menjemput bola yang mana pemerintah menye-diakan bus vaksinasi keliling yang akan menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sembari mensosialisasikan vasinasi Covid-19 dan juga mewajibkan menyertakan kartu vaksin bagi ma-syarakat yang hendak mengakses pelayanan publik dan tempat-tempat umum. Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru be-kerjasama dengan seluruh aspek Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu TNI, Polisi, Camat, Lurah, RT/RW, tokoh agama dan masyarakat.
2. Terlaksananya percepatan kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru memiliki faktor-faktor yang memengaruhi, faktor pendukungnya antara lain ketegasan pemimpin dalam meng-ambil kebijakan; kerja sama dengan berbagai pihak; kelancaran komu-nikasi; SDM yang memadai; serta penerapan prinsip keadilan. Selain faktor keberhasilan terdapat faktor penghambat percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru, kendala yang dihadapi partisipasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal dan juga kolaborasi yang belum efektif yang mana data dari

badan statistik belum diperbaharui karena banyak masyarakat yang belum memperbaharui data kependudukan terkhusus lansia yang sudah mati.

Pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19, oleh karena itu diperlukannya untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan merata pada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin covid-19 sehingga dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Peran tenaga kesehatan maupun pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada lansia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesediaan lansia dalam program vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. (2012). Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. In *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi / Psikologi Kepemimpinan* (ed.1 ed., Vol. xiv, p. 34). Erlangga.
- Budoyo, R. A. (2021, juli minggu, 04). Duh! Vaksinasi Massal di Pekanbaru Ricuh. *Vaksinasi massal di Pekanbaru, Riau, diwarnai keributan*, pp.<https://www.medcom.id/nasional/daerah/8ko4JMOKduhvaksinasimassal-di-pekanbaru-ricuh>.
- corona.riau.go.id. (2021, Agustus 12). *Update COVID-19 Provinsi Riau*. Retrieved Agustus 2021, 13, from Riau Tanggap COVID-19: <https://corona.riau.go.id/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New York: SAGE.
- Dasgupta, M., & Gupta, R. K. (2009). Innovation In Organizations: A Review Of The Role. *Global Business Review*, 203-224.
- Fontana, A. (2011). *Innovate We Can ! : manajemen inovasi dan penciptaan nilai individu, organisasi, masyarakat / Avanti Fontana ; editor, Phillip Gobang*. Jakarta: Cipta Inovasi Sejahtera.
- G, Z. N. (2016). *Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone- Bone Kecamatan Barakaka Bupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Hassanudin
- Halvorsen, T. (2005). *Innovation in the Public Sector On the differences between public and private sector innovation*. Oslo: Publin Report.
- Martinez, L. (2012). *Theoretical considerations about Innovation in the Public Sector*. Denmark: Roskilde.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*.
- Nurhadi, H. (2013, oktober 17). *Kepemimpinan Strategis dan Manajemen Perubahan*. Retrieved oktober 15, 2021, from [kompasiana: https://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/552fd1e66ea8347c428b45c6/kepemimpinan-strategis-danmanajemen-perubahan](https://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/552fd1e66ea8347c428b45c6/kepemimpinan-strategis-danmanajemen-perubahan)

- Osborne, S. P., & Brown, K. A. (2005). *Managing change and innovation in public nservice organizations*. New York: Routledge.
- pekanbaru.go.id. (2020, september 25). *Penajaman tugas pemko bentuk satgas penanganan covid19*. Retrieved februari 02, 2022, from <https://pekanbaru.go.id/https://pekanbaru.go.id/p/news/penajaman-tugas--pemko-bentuk-satgas-penanganan-covid-19>
- Rahayu, A. Y. (2015). *Manajemen Perubahan Dan Inovasi*. Jakarta: UI Press.
- Rogers, e. M. (2010). *Diffusion of Innovations*. New York: Simon and Schuster.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Widiyahseno, B. (2015, maret 5). *Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. Membangun Kesadaran Inovasi Birokrat*, 18(Nomor 3), 177-195.
- Yuliana. (2020). *Corona Virus Diseases (Covid19): Sebuah Tinjauan Literatur*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).